

# KEKUATAN EKONOMI DAN PENCEGAHAN EKSTREMISME-KEKERASAN

Pemberdayaan dan Aktivisme Sosial Ekonomi  
di Kalangan Pemuda Muslim



Assessment of Existing Economic Skills-Oriented Program  
with Policy Recommendation on Economic Empowerment for Youth  
and Support for Best Practices

PSTPG FISIP UIN Jakarta – PPIM UIN Jakarta – UNDP Indonesia

## **CONVEY REPORT**

Kekuatan Ekonomi dan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan  
Pemberdayaan dan Aktivisme Sosial Ekonomi  
di Kalangan Pemuda Muslim

Vol. 1 | No. 5 | Tahun 2018

Penanggung Jawab:

PPIM UIN Jakarta; PSTPG FISIP UIN Jakarta; UNDP Indonesia

Penulis : Badrus Sholeh

Tim Peneliti : Badrus Sholeh, Irfan R. Hutagalung,  
Muhammad Guntur Alting,  
Nostalgawan Wahyudi, Saifudin Asrori,  
dan Sholehuddin.

Editor : Ahmad Syaifuddin Zuhri

Layouter : Waki Ats Tsaqofi

Penerbit:

Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG)  
FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Gedung FISIP UIN Jakarta Lt. 4

Jl. Kertamukti No. 5 RT 002/ 006 Pisangan, Ciputat Timur,  
Tangerang Selatan 15412 Banten, Indonesia

Telepon: 021-74705215/ 74702013

Email: [pstpg.uinjkt@gmail.com](mailto:pstpg.uinjkt@gmail.com)

Website: <http://pstpg.fisip.uinjkt.ac.id>

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	1
I. LATAR BELAKANG .....	3
II. FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI.....	6
III. KIPRAH KAUM MUDA.....	7
IV. PERDEBATAN KONSEP .....	11
V. EKONOMI DAN TERORISME .....	14
VI. KAUM MUDA DAN KESEMPATAN EKONOMI.....	16
VII. PERAN PEMERINTAH .....	19
VIII. PENGUATAN KOMUNITAS .....	23
IX. LINTAS SEKTORAL.....	25
X. HAMBATAN DAN TANTANGAN .....	28
XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	31
Profil Penulis .....	35
Profil Lembaga.....	36



## Ringkasan Eksekutif

Kaum muda Indonesia berperan aktif dalam kegiatan sosial ekonomi. Mereka melakukan inisiatif membangun komunitas ekonomi dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Partisipasi mereka tidak diiringi dengan kesempatan ekonomi pemerintah dan masyarakat. Indonesia masih menempati peringkat bawah dalam pemberian kesempatan ekonomi bagi kaum muda dibandingkan dengan beberapa negara asia. Padahal keterampilan ekonomi tidak hanya penting bagi mereka untuk tumbuh menjadi warga negara yang kuat dan mandiri, tetapi efektif menjadi mekanisme dan alat mencegah dan menanggulangi terorisme. Ekonomi menjadi salah satu pendekatan yang digunakan negara baik dalam proses deradikalisasi maupun pencegahan terorisme. Karena itu, pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda menjadi strategis tidak hanya memberi fondasi mereka untuk terlepas dari masa lalu kelompok kekerasan, termasuk terorisme, tetapi juga menciptakan kepercayaan diri untuk menolak ajakan melakukan kekerasan dan kegiatan kriminal lainnya.

Kajian ini berdasarkan studi lapangan di lima provinsi di Indonesia dengan melihat bagaimana pemerintah dan masyarakat melakukan peningkatan keterampilan ekonomi bagi kaum muda dan dampaknya bagi upaya penanggulangan terorisme, serta aksi kekerasan dan kriminal lainnya. Metodologi penelitian terdiri dari wawancara mendalam dan FGD terhadap sekitar seratus responden yang dilakukan antara 1 Agustus 2017 hingga 29 Januari 2018. Beberapa temuan penting dari studi ini adalah (1) kebijakan pemberdayaan ekonomi berhasil mengatasi dan mencegah terorisme, (2) program ekonomi dilakukan secara jangka pendek, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan, (3) kerjasama multi-stakeholder menjadi kebutuhan krusial dalam membangun pemberdayaan ekonomi secara jangka panjang dan komprehensif.

Studi ini direkomendasikan untuk pemerintah khususnya BNPT, Kementerian Sosial, Kemenko Polhukam, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenristekdikti yang terlibat secara langsung dalam kebijakan ekonomi kaum muda dan bagaimana program ini bisa ikut mengatasi dan mencegah terorisme di Indonesia. Selain pentingnya kerjasama antar

kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pada level regional juga penting dilakukan kerjasama antar negara anggota ASEAN khususnya dalam kasus perbatasan di Kalimantan Utara antara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Terorisme transnasional membutuhkan kerjasama internasional secara lebih kuat dan efektif.

**Kata Kunci:** Kaum Muda, Kebijakan Ekonomi, Terorisme dan Kekerasan

## I. LATAR BELAKANG

Farhan Mujahidin (19) pelaku penyerangan polisi pada 31 Agustus 2012 di Solo baru lulus dari Pesantren Al Mukmin Ngruki. Farhan membentuk kelompok belajar khusus saat masih di Madrasah Aliyah. Kelompok belajar ini membahas artikel-artikel dan materi khutbah Jumat yang diunggah di blog pribadi Aman Abdurrahman (46), seorang narapidana teroris (napiter) yang dikenal sebagai ideolog terkemuka di organisasi Jamaah Islamiyah (JI). Farhan membentuk kelompok kecil tanpa sepengetahuan para ustadz pondok.<sup>1</sup> Operasi penyerangan pos polisi di Solo berasal dari gagasan Farhan setelah mengkaji pemikiran Aman Abdurrahman bahwa polisi adalah *thagut* yang kemudian menjadi target utama kelompok Aman dan ISIS Indonesia. Analisis dan pernyataan Aman banyak dikaji, didiskusikan dan diunggah ulang di ratusan media sosial semisal Facebook, Twitter dan Telegram yang dikelola oleh pengikut ISIS Indonesia.

Fenomena Farhan bisa dibilang mewakili kelompok muda Muslim, seperti siswa, mahasiswa dan kaum muda lainnya yang lebih gemar menggunakan sumber media *online* dan media sosial daripada materi dari guru atau buku. Survei PPIM UIN Jakarta yang dilakukan pada periode 1 September – 7 Oktober 2017 menyebutkan pelajar dan kaum muda umumnya “gemar mencari pengetahuan agama melalui internet (*blog*, *website* dan media sosial) dengan persentase 54.87%. Sumber rujukan kedua adalah buku/kitab dengan persentase 48.57%, siaran televisi menempati posisi ketiga dengan persentase 33.73%.”<sup>2</sup>

Dalam sebuah dialog antara Aman Abdurrahman dan polisi pada 14 April 2011 di Polda Jakarta Barat, Aman meyakinkan:

“Kami tidak sama dengan pemerintah ini, kami ingin Allah sebagai rujukan hukum, sedangkan pemerintah ini punya rujukan yang lain...

---

<sup>1</sup> Wawancara di Pesantren Al Mukmin Ngruki, 1 Oktober 2012. Millahibrahim.wordpress.com adalah web pribadi Aman Abdurrahman. Memuat catatan, khutbah jumat, terjemahan dan buku Aman Abdurrahman. Selama bertahun-tahun web mudah diakses. Kini web ditutup oleh pemerintah Indonesia.

<sup>2</sup> “April Dalam Sekam: Keberagaman Gen Z,” Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hal. 6.

Yang jelas saya sudah menjelaskan prinsip saya... dan saya tetap mengajak Bapak untuk keluar dari polisi karena itu kemusyrikan yang membatalkan amalan."<sup>3</sup>

Ajakan Aman bagi pengikutnya untuk menyerang polisi dilakukan dalam beberapa aksi. Seruan Aman disebarkan melalui media sosial. Pada 2015 Aman Abdurrahman (46) dan Bachrumsyah (33) mendirikan Jama'ah Ansharut Daulah (JAD), salah satu organisasi yang berbai'at pada Abu Bakar Al Baghdady pimpinan ISIS di Irak.

Kisah lain yang menyerupai Farhan adalah Muhammad Ibnu Dar (20). Ia baru lulus SMA dua tahun ketika menunjukkan terpengaruh kelompok JAD melalui internet. Pada 11 April 2017, Ibnu Dar menyerang polisi dengan menabrakkan motor di Mapolres Banyumas, Jawa Tengah. Sebulan kemudian, 24 Mei 2017 Ahmad Sukri (32) dan Ichwan Nurul Salam (32) -masing-masing adalah pedagang kecil sebelum menyibukkan diri dengan memperdalam pelajaran agama- meledakkan diri di Terminal Kampung Melayu di tengah sekelompok polisi yang sedang berjaga dalam acara pawai obor yang diselenggarakan oleh FPI (Front Pembela Islam). Tiga anggota kepolisian meninggal.<sup>4</sup>

Penggunaan media sosial dan internet sebagai instrumen komunikasi dan propaganda yang mudah diakses dan menjadi daya tarik kuat bagi kaum muda. Farhan di antara remaja lainnya lebih memilih untuk mengunduh artikel di situs Millah Ibrahim milik Aman Abdurrahman sebagai bahan diskusi dibandingkan materi pelajaran gurunya di pondok Ngruki. Siswa dan mahasiswa memiliki opini dan pemikiran ekstrim akibat informasi yang didominasi *blog* dan media daring yang dikelola oleh kelompok radikal.

M. Haris Iskandar, staf pengajar Pesantren Al Hidayah Medan, pesantren yang dibangun Khairul Ghazali mantan napiter, menyatakan bahwa siswa rentan menjadi target kelompok teroris khususnya ISIS. Pola komunikasi dan hubungan diawali melalui *chatting* dalam media daring semisal Facebook atau Telegram. Di

---

<sup>3</sup> Abu Sulaiman Aman Abdurrahman, *Mutiara Dari Balik Penjara Penyejuk Orang Yang Beriman*, Banten: P.T.A Press, 2013, hal. 211-213. Buku ini dipasarkan secara terbatas melalui blog millahibrahim.

<sup>4</sup> Forum Keadilan, "Empat Catatan Teror Kepada Polisi," 10 Juli 2017 diakses pada 14 Februari 2018 dari <https://forumkeadilan.com/forut/empat-catatan-teror-kepada-polisi/>.

antara korban adalah siswi yang telah terpapar oleh kelompok ISIS, kemudian diantar oleh orangtuanya ke Pesantren Al Hidayah untuk mendapatkan penyadaran. Iskandar menjelaskan:

“Pesantren Al Hidayah memberikan pengarahan dan pembinaan kepada keluarga yang anak gadisnya hendak dinikahi dan akan dibawa ke Suriah oleh seorang anggota ISIS. Dalam hal ini Pesantren Al Hidayah bekerja sama dengan BNPT karena ini menyangkut keamanan negara. Saat ini gadis itu putus hubungan dengan anggota ISIS tersebut.”<sup>5</sup>

Kisah dari sejumlah pemuda di atas menunjukkan bahwa, kaum muda rentan mendapatkan pengaruh negatif dari kelompok radikal dan teroris. Usia muda dipercayai sebagai faktor yang menyumbangkan perilaku seseorang untuk mencari jati diri, penuh gejolak, dan cenderung menunjukkan kepenasaran intelektual. Dalam konteks menyediakan ruang aktivitas kelompok usia muda inilah, perlu diciptakan program-program pemberdayaan yang difokuskan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi dan aktivitas sosial lainnya. Energi positif mereka dikembangkan melalui kegiatan pelatihan wirausaha dan peningkatan keterampilan bekal baik untuk memasuki dunia kerja. Sekitar 24% kaum muda Indonesia masih belum mendapatkan bimbingan pendidikan, pelatihan dan terancam menjadi pengangguran. Meskipun dana pendidikan nasional telah jauh meningkat, tetapi sasaran pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran di dunia kerja masih belum memenuhi harapan dan bekal dasar persaingan dunia kerja secara nasional dan regional.<sup>6</sup> Inisiatif kaum muda di Medan, Poso, Solo, Lamongan dan Nunukan dalam melakukan usaha dan membangun komunitas kreatif membutuhkan dukungan modal dan pendampingan dari pemerintah dan masyarakat. Widodo yang mendampingi banyak kaum muda di antaranya mantan napiter di Solo menyadari proses dan dinamika kaum muda yang tumbuh dan mencari jati diri membutuhkan pendampingan dan bimbingan usaha. Dapoer Bistik

---

<sup>5</sup> M. Haris Iskandar, *Pesantren Al Hidayah sebagai Pusat Edukasi dan Deradikalisasi di Indonesia*, paper dipresentasikan dalam Seminar dan Lokakarya Aliansi Sumut Bersatu (ASB)-PSTPG-PPIM UIN Jakarta di Medan, 24 Januari 2018, hal. 3.

<sup>6</sup>The Global Youth Wellbeing Index 2017. Diakses pada 13 Februari 2018 dari <https://www.youthindex.org/country/indonesia>.

Solo bagi mereka menjadi transit menuju kegiatan wirausaha yang lebih tepat bagi mereka.<sup>7</sup>

## II. FOKUS KAJIAN DAN METODOLOGI

Convey Report ini mengulas kebijakan pemerintah terkait program pemberdayaan dan peningkatan keterampilan ekonomi kaum muda, pencegahan radikalisme dan terorisme. Dengan menelusuri program-program pemberdayaan itu, report ini menampilkan pengalaman dari beberapa daerah di Indonesia tentang bagaimana para mantan teroris kini terlibat aktif dalam mengatasi terorisme, serta bagaimana kerjasama pusat dan daerah dilakukan dalam kegiatan ekonomi sebagai pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Report ini ditulis berdasarkan studi lapangan antara Agustus 2017 hingga Januari 2018 di lima provinsi di Indonesia, yaitu Medan-Sumatra Utara, Nunukan-Kalimantan Utara, Poso-Sulawesi Tengah, Solo-Jawa Tengah dan Lamongan-Jawa Timur. Studi lapangan disertai wawancara mendalam atas lebih dari seratus responden, beberapa kali FGD dan analisis dokumen pemerintah dan *think tank* terkait asesmen keterampilan ekonomi kaum muda dan tantangan *Countering Violent Extremism (CVE)* di Indonesia. Kegiatan ekonomi kaum muda tidak hanya terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme, beberapa studi di perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina di Nunukan-Pulau Sebatik-Kalimantan Utara terkait dengan pertahanan negara, keamanan perbatasan, dan aksi kriminal. Termasuk perdagangan obat terlarang dan pekerja ilegal.

Studi ini penting untuk melihat bagaimana program ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya BNPT dan kementerian terkait dalam rangka deradikalisasi dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Argumen studi ini adalah, bahwa pemerintah melakukan bantuan dan pemberdayaan ekonomi tanpa melibatkan secara sistematis stakeholder lokal dan daerah yang justru menjadi ujung tombak kegiatan dari program-program tersebut. Akibatnya, program dan bantuan ekonomi tidak mendapatkan evaluasi, perbaikan dan monitoring yang ketat. Ini berpengaruh kuat terhadap keberlanjutan dan kesinambungan program ekonomi bagi

---

<sup>7</sup> Widodo, wawancara di Yogyakarta, 29 Januari 2018.

kaum muda, khususnya mantan napiter yang mendapatkan pendampingan.

### III. KIPRAH KAUM MUDA

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi batasan kaum muda antara 15-24 tahun. Meski PBB mengakui istilah kaum muda sesungguhnya lebih cair daripada sekedar batasan umur itu. Batasan ini untuk kepentingan statistik anggota PBB secara umum. UNESCO mendefinisikan kaum muda sebagai "a period of transition from the dependence of childhood to adulthood's independence and awareness of our interdependence as members of a community [periode transisi dari ketergantungan masa kanak-kanak menuju kemandirian masa dewasa dan kesadaran saling mengisi sebagai anggota komunitas]." <sup>8</sup> Beberapa organisasi muda memiliki anggota melampaui batasan yang disebutkan oleh PBB.

Indonesia membatasi umur kaum muda sedikit lebih longgar. Menurut UU No. 40/ 2009 dikatakan pemuda "warga negara Indonesia berusia 16-30 tahun" (BPS 2015). Jumlah pemuda Indonesia sekitar 65 juta atau sekitar 25% dari total penduduk Indonesia. UN ESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) menyatakan bahwa pemuda yang berumur 15-24 di Asia Pasifik berjumlah lebih dari 750 juta atau sekitar 60 persen dari total pemuda dunia. <sup>9</sup> Besarnya kaum muda memberi potensi besar bahwa mereka seharusnya bisa mendominasi lapangan kerja maupun dunia usaha.

Harapan besar juga diarahkan kepada kaum muda agar mereka tumbuh dan berkembang di tengah tantangan kekerasan politik khususnya terorisme dan radikalisme. Masyarakat Muslim Indonesia terbelah ketika memandang masalah radikalisme dan ekstrimisme yang terjadi di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh PSTPG (2017) mengenai program pemberdayaan ekonomi untuk kaum muda dalam rangka menangkal CVE melihat bahwa 48% responden Muslim Indonesia menganggap kelompok radikal

---

<sup>8</sup>"What do we mean by "youth", diakses pada 13 Februari 2018 dari [www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/](http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/).

<sup>9</sup>"Youth in Asia Pacific", diakses pada 7 Februari 2018 dari <http://www.unescap.org/resources/youth-asia-pacific>.

dan ekstrimis menjadi masalah penting. Sementara sisanya menganggap sebaliknya bahwa hal tersebut bukan hal yang perlu dikhawatirkan (52%). Dengan adanya perpecahan pandangan ini maka kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi radikalisme dan terorisme mengalami hambatan.

Dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi terorisme melalui berbagai program termasuk pemberdayaan ekonomi bagi kaum muda tidak terjadi secara maksimal. Lemahnya dukungan masyarakat telah dirasakan oleh beberapa lembaga pelaksana kegiatan pemberdayaan yang diprakarsai oleh sejumlah mantan teroris dan kaum muda di Medan, Solo dan Poso. Mayoritas masyarakat Muslim di Medan tidak menyadari keberadaan Pesantren Al Hidayah yang dikembangkan oleh Khairul Ghazali, mantan teroris yang dianggap terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga Medan. Ghazali membuka pesantren sebagai pusat pendidikan dan pelatihan rehabilitasi bagi anak-anak yang rentan terlibat dalam gerakan terorisme. Masyarakat Medan dan Sumatra Utara tidak mendapat informasi yang cukup atas keberadaan maupun kegiatan Pesantren Al Hidayah, satu di antara sedikit pusat pendidikan yang khusus dikembangkan sebagai pusat rehabilitasi dan pencegahan terorisme.<sup>10</sup>

Kaum muda dijadikan target rekrutmen melalui media sosial dan publikasi *online* yang gencar dilakukan oleh kelompok teroris khususnya jaringan ISIS. Sikap dan opini mereka yang cenderung radikal diperparah dengan pandangan apatis atas perkembangan ekonomi.

Meski mereka tidak mendapatkan kesempatan ekonomi yang memadai, tetapi mereka aktif dalam partisipasi sosial politik. Gambaran kaum muda Indonesia tercermin dalam beberapa survei dan *polling* baik di level nasional dan internasional. Indonesia mendapat perhatian internasional semenjak serangan WTC 11 September 2001 dan Bom Bali I, 12 Oktober 2002. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di Asia Tenggara dan lokasi berkembangnya organisasi teroris terbesar di Asia Tenggara, yaitu

---

<sup>10</sup> Catatan Seminar dan Lokakarya Aliansi Sumut Bersatu (ASB), PSTPG dan PPIM di Medan, 24 Januari 2018.

Jama'ah Islamiyah, Indonesia mengalami masa dimana terorisme menjadi ancaman nyata di masyarakat.

Pada awal dasawarsa 1000an, terorisme dan radikalisme belum menjadi perhatian serius bagi banyak kalangan. Tetapi dengan serangkaian peristiwa kekerasan yang mengemuka atas nama agama, khususnya setelah peristiwa serangan World Trade Center, New York, oleh sekelompok teroris pada 2001, baik pemerintah maupun masyarakat mulai tergugah untuk menjadikan terorisme sebagai ancaman. Bom Bali 2005 semakin membuka mata masyarakat bahwa gerakan teroris ada di tengah masyarakat dan menjadi mengancam instabilitas negara. Bahkan aksi pemboman banyak dilakukan dengan menggunakan anak muda belasan tahun sebagai "pengantin." Dani Dwi Permana (18), baru lulus SMA swasta di Jakarta ketika bertemu kelompok Noordin M. Top dan berhasil direkrut menjadi pelaku bom bunuh diri atau sering disebut "pengantin" di kalangan kelompok teroris dalam aksi Bom Hotel J.W. Marriott dan Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 17 Juli 2009.<sup>11</sup> Anif Sholhanudin alias Pendek bin Suryadi (24) adalah kaum muda lainnya yang disiapkan menjadi "pengantin" pada Bom Bali II, 1 Oktober 2005.<sup>12</sup> Ia digembleng dan dilatih oleh Subur Sugiarto alias Abu Isa selaku *Qo'id Fi'ah*<sup>13</sup> dan melaporkan langsung kepada

---

<sup>11</sup> Kompas, "Pelaku Bom Bunuh Diri Marriott Remaja 18 Tahun," 8 Agustus 2009, diakses pada 10 Februari 2018 dari <http://teknokompas.com/read/2009/08/08/18180192/pelaku.bom.bunuh.diri.marriott.remaja.18.tahun>.

<sup>12</sup> Antara, "Pelaku Bom Bali 2005 Diganjar 15 Tahun Penjara," 14 September 2006. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/42263/pelaku-bom-bali-2005-diganjar-15-tahun-penjara-pada-28-februari-2018>. Anif dipenjara di Lapas Kedung Pane Semarang. Segera setelah Anif menyelesaikan masa tahanannya pada 2013, ia bekerja menjadi kurir JNE di Surabaya. Melalui jaringan kurir ini, Anif masuk dalam lingkaran ISIS kelompok Weleri Kendal sekitar 2015. ISIS meminta Anif untuk menceraikan istri pertama karena tidak mengikuti dia bergabung dengan ISIS. Ia menikah lagi dengan perempuan ISIS. Di Jawa Tengah, beberapa pasangan Suami ISIS dan istri bukan ISIS atau sebaliknya dinyatakan oleh ISIS jatuh talaknya. Anif juga mengkafirkan teman-teman dekatnya karena berseberangan gerakan jihad termasuk kepada Yusuf. Yusuf, wawancara di Jakarta, 16 Maret 2018. Penulis bersama Yusuf pernah berkunjung ke Anif sekitar 2012 di Lapas Kedung Pane Semarang. Ia napiter paling muda, dan nampak ada perubahan lebih terbuka saat interaksi dan dialog. Sebagai jihadis muda, Anif menjadi incaran kelompok teroris dan ISIS berhasil mempengaruhinya setelah selesai masa tahanan.

<sup>13</sup> *Qo'id Fi'ah* adalah penanggungjawab kelompok pada level kecamatan. Di antara kegiatannya membuat halaqah lokal dan rekrutmen jika dilakukan amaliyah atau aksi terror. Diatas *Qo'id Fi'ah* ada *Qo'id Qirdas*. Noordin M. Top menggunakan resources hingga level kecamatan dalam aksi terror dan perlindungan selama masa pelarian.

Noordin M. Top. Menjelang aksi, peran digantikan oleh Salik Firdaus (Majalengka, Jabar), Misno (Cilacap, Jateng), dan Aip Hidayatullah (Ciamis, Jabar).<sup>14</sup> Daftar nama-nama kaum muda semakin banyak setelah ISIS gencar menggunakan media sosial dan internet sebagai sarana propaganda dan rekrutmen kaum muda dalam ancaman gerakan terorisme di Indonesia. Pendampingan dan pencegahan khusus terhadap kaum muda menjadi kebutuhan mendesak meski secara umum dalam survei Pew Research Center (2017) bahwa kaum muda Indonesia memiliki kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan maju.

Pew Research Center pada musim semi 2017 menyimpulkan bahwa Indonesia, Filipina dan India memiliki harapan tinggi terhadap generasi muda. Mereka sangat yakin bahwa generasi muda akan memiliki kehidupan yang lebih baik daripada orang tua mereka. Kaum muda Indonesia (58%), Filipina (61%), dan India (76%) jauh melampaui harapan dan optimisme atas kaum muda Korea Selatan (34%), Australia (24%) dan Jepang (19%).<sup>15</sup>

Harapan ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa kaum muda tidak mendapat kesempatan yang cukup dalam melakukan kegiatan ekonomi, kewirausahaan dan kemudahan dalam dunia usaha. Bahkan Indonesia menempati level tiga dari bawah dalam pemberian kesempatan ekonomi.

The Global Youth Wellbeing Index 2017 menempatkan Indonesia pada urutan tengah yaitu peringkat 10. Dalam indeks ini dinyatakan bahwa "Indonesian youth are civically engaged, but they need more access to technology and employment opportunities [kaum muda Indonesia terlibat secara aktif sebagai warga negara, tetapi mereka membutuhkan akses lebih atas teknologi dan kesempatan kerja]." Tiga aspek paling rendah bagi kaum muda Indonesia adalah kesempatan ekonomi (20), kesetaraan gender (21) dan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) (23). Pada level Asia, kesempatan ekonomi bagi kaum muda masing-masing yaitu Filipina (24), India (23), Vietnam (17), China (9), Thailand (7) dan

---

<sup>14</sup> Rakyat Merdeka, "Pelaku Bom Bali 2005 Diganjar 15 Tahun Penjara," 14 September 2006, diakses pada 12 Februari 2018 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-bom-bali-2005-diganjar-15-tahun-penjara-7ctu2qc.html>.

<sup>15</sup> Bruce Stokes, "Global Publics More Unbeat about the Economy," 5 Juni 2017. Diakses pada 13 Februari 2018 dari <http://www.pewglobal.org/2017/06/05/2-public-divided-on-prospects-for-the-next-generation/>

Jepang (6).<sup>16</sup> Indonesia perlu memberi perhatian lebih dalam terhadap kebijakan ekonomi bagi kaum muda baik pada pemerintah lintas kementerian dan dinas, maupun dalam dunia usaha. Kaum muda Indonesia menempati level tinggi pada aspek partisipasi kewarganegaraan (2) dan pendidikan (11). Kaum muda aktif dalam partisipasi politik dan upaya mereka dalam kegiatan sosial ekonomi meski tidak mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah dan dunia usaha. Meningkatnya dana pendidikan pasca Orde Baru membuat kaum muda memiliki kesempatan pendidikan yang lebih baik. Ini memberi harapan besar mereka untuk memiliki kualitas lebih kompetitif.

#### IV. PERDEBATAN KONSEP

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu pendekatan strategis dalam deradikalisasi dan pencegahan terorisme. Hubungan antara keamanan dan pembangunan “secara khusus terbukti ketika melihat di luar penafsiran tradisional keamanan nasional atas *human security*, termasuk ancaman lingkungan, ekonomi, kesehatan dan kriminal lainnya.”<sup>17</sup> Pendekatan ini diterapkan di beberapa negara dalam kebijakan kontra terorisme mereka. John Horgan menyatakan pentingnya memisahkan individu dan kelompok kekerasan dari yang lain (*disengagement*). Horgan melanjutkan memahami proses “from involvement ...to disengagement” merupakan pendekatan baru psikologi teroris melalui sharing pengalaman para pelaku terorisme bagaimana mereka terlepas dari kelompok dan sel jaringan.<sup>18</sup> Keputusan mereka untuk terlepas dari kelompok lama memiliki beragam alasan yang menarik untuk dikaji melalui multidimensi keilmuan.<sup>19</sup> Dalam pengalaman di Indonesia, *disengagement* para

---

<sup>16</sup> “The Global Youth Wellbeing Index 2017,” diakses pada 10 Februari 2018 dari <https://www.youthindex.org/country/indonesia>.

<sup>17</sup> Eelco Kessels and Christina Nemr, “Countering Violent Extremism and Development Assistance Identifying Synergies, Obstacles, and Opportunities,” Policy Brief, February 2016, Global Center on Cooperative Security. Accessed on January 04, 2018 from <http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/01/Feb-2016-CVE-and-Development-policy-brief.pdf>.

<sup>18</sup> John G. Horgan, “Psychology of Terrorism: Introduction to the Special Issue,” *American Psychologist*, 2017, Vol. 72, No. 3, hal. 201.

<sup>19</sup> John Horgan et al, “Walking away: the disengagement and de-radicalization of a violent right-wing extremist,” *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 2016, Society for Terrorism Research.

mantan nara pidana teroris berlanjut di luar penjara. Pemberdayaan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu pendekatan dan instrumen untuk pemisahan ini. Beberapa mantan napiter yang lebih terbuka dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan dan program ekonomi lainnya, namun terpisah dari mereka yang menolak bahkan menganggap menerima bantuan pemerintah mencederai akidah keagamaan dan prinsip jihad mereka.

Beragam pola dan model bisa ditampilkan bagaimana seorang teroris melakukan perubahan meninggalkan kekerasan. Faktor agama, keluarga, interaksi sosial, dialog dan komunitas adalah sebagian alasan untuk sepenuhnya berkomitmen meninggalkan kehidupan kekerasan pada masa lalu dan meneguhkan diri bergabung dalam pengembangan komunitas untuk perdamaian dan aktivitas sosial-ekonomi yang produktif. Pemahaman atas pola-pola ini bisa ditarik menjadi kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi terorisme melalui kerjasama multi pihak. John Horgan menyatakan "many potential ways out of terrorism, and that if we tried to identify them there might be implications for the development of policy initiatives."<sup>20</sup> Horgan melakukan wawancara mendalam terhadap puluhan teroris ultra nasionalis dan radikal jihadis.

Julie Chernov Hwang selama enam tahun, sekitar 2011-2017, melakukan wawancara mendalam terhadap lebih dari seratus jihadis di berbagai kota di Indonesia dari beragam kelompok seperti Jama'ah Islamiyah, Mujahidin Kompak, Ring Banten, Laskar Jihad dan Tanah Runtuh. Chernov Hwang melihat banyak perubahan individu dan kelompok jihadis di Indonesia dengan beragam alasan baik agama maupun psikologis. Mereka meninggalkan pengalaman kekerasan pada masa lalu, dan berkomitmen dalam mengembangkan komunitas damai melalui kegiatan sosial-ekonomi dan kerja sosial lainnya.<sup>21</sup> Ali Fauzi dan Arifuddin Lako merupakan contoh mereka yang telah melakukan transformasi diri dan memiliki pengaruh kuat atas ratusan mantan teroris dan kombatan lainnya.

---

<sup>20</sup> John Horgan, *Walking Away from Terrorism Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*, New York: Routledge, 2009, hal. 6.

<sup>21</sup> Julie Chernov Hwang, *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*, Ithaca: Cornell University Press, 2018.

Lako menegaskan “Komunitas Rumah Katu menjadi wahana mediasi dan interaksi mantan teroris, mantan kombatan, dan anak muda lainnya baik Muslim maupun Nasrani.”<sup>22</sup> Lako ditunjuk sebagai direktur Komunitas Rumah Katu, dan kini memproduksi film dokumenter dan film pendek sebagai pembelajaran generasi milenial atas konflik Poso, bagaimana mencegah kekerasan, dan menciptakan perdamaian secara permanen.

Penjara sebagai pusat rehabilitasi napiter memiliki pengaruh kuat dalam transformasi mereka dari kehidupan kekerasan ke perdamaian. Interaksi antar napiter dan waktu reflektif yang cukup membuat terjadinya transformasi diri dalam penjara. Meskipun beberapa di antara mereka kembali pada komunitas kekerasan, terutama bagi mereka yang kecewa atas lemahnya dukungan sosial dan penolakan di masyarakat. Transformasi mantan napiter dan kombatan dalam konteks ini terdiri dari dua hal. Pertama melalui penguatan komunitas, dan kedua, melalui kerjasama lintas sektoral.

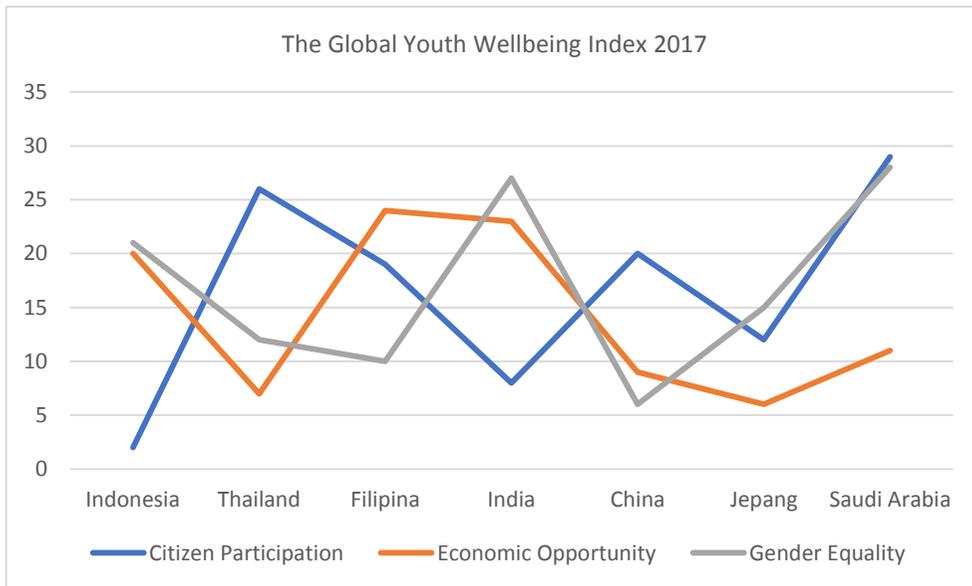
Indonesia memiliki potensi partisipasi kaum muda yang besar dalam mendukung program pemerintah dan masyarakat. Dalam The Global Youth Wellbeing Index 2017 Indonesia menempati peringkat 2 partisipasi warga negara dan nomor 11 pada bidang pendidikan bagi kaum muda. Tetapi pada aspek kesempatan ekonomi, Indonesia menempati peringkat tiga terbawah. Bahkan lebih rendah lagi dalam kesetaraan gender dan TIK dengan peringkat masing-masing di urutan 21 dan 23 (Grafik 1). Ini menunjukkan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk menggerakkan kaum muda dalam kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi. Secara umum peringkat Indonesia berada pada level menengah di regional, yaitu peringkat ke-sepuluh.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Arifuddin Lako, wawancara di Poso, 22 Januari 2018.

<sup>23</sup> “The Global Youth Wellbeing Index,” diakses pada 01 Februari 2018 dari <http://www.youthindex.org/country/indonesia>.

Grafik 1: Kesempatan Ekonomi Kaum Muda<sup>24</sup>



## V. EKONOMI DAN TERORISME

Kondisi kaum muda di Indonesia dan Asia Pasifik akan memberi pengaruh besar terhadap kaum muda di wilayah lain. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan menjadi tempat tumbuhnya sejumlah kelompok teroris dari Jl hingga ISIS, Indonesia memiliki dua aspek yang menjadi perhatian internasional. Pertama, aspek positif sebab berhasil meredam aksi terorisme dan melakukan *soft approach* (pencegahan) terhadap mantan napiter dan teroris. Kedua, di sisi lain, keterbukaan Indonesia dimanfaatkan oleh komunitas radikal jihadis untuk terus mengembangkan diri. Mereka memiliki kelompok-kelompok kecil yang aktif fokus dalam persiapan taktis seperti pelatihan fisik dan militer, serta operasi intelijen dan propaganda melalui media *online* yang mereka kendalikan dan pertemuan pengajian. Kaum muda dalam kelompok kedua ini paling antusias. Mereka seolah menemukan jati diri. Bahkan di kalangan muda jaringan Jl sendiri melakukan kritik terhadap para mantan atau seniornya yang dianggap terlalu dekat dengan pemerintah atau tidak melakukan sesuatu di tengah tekanan umat

<sup>24</sup> Diolah dari The Global Youth Wellbeing Index 2017. Diakses pada 11 Februari 2018 dari <https://www.youthindex.org/>.

Islam. Keterbukaan Indonesia tercermin dari longgarnya pemerintah dalam mengatur media *online*. Beberapa media ekstrimis yang direkomendasikan BNPT untuk ditutup mendapat kritik tajam dari anggota DPR. Perdebatan di kalangan pemerintah berkenaan dengan simpang siur kelembagaan ini dalam membuat kebijakan memerangi terorisme dan ekstrimisme yang tidak berjalan secara koheren.

Tingkat intoleransi dan radikalisme kaum muda Indonesia, khususnya siswa dan mahasiswa, juga menjadi agenda tersendiri untuk diselesaikan. Bahkan bisa dikatakan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Survei Nasional tentang Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia pada 2017 menemukan 23.35% siswa dan mahasiswa menyatakan "aksi terror melalui bom bunuh diri diakui dalam Islam," dan 37,71% mengakui "Jihad adalah nilai dalam Islam yang ditujukan kepada non Muslim."<sup>25</sup> Mayoritas mereka menilai kondisi ekonomi dan kesenjangan kaya miskin sangat parah yaitu 52.29% dan menilai ekonomi cukup parah, 43.46%. Sikap dan opini intoleran dan radikal, disertai penilaian atas kondisi ekonomi yang tidak kondusif akan menjadi target empuk bagi kelompok jihadis dan teroris untuk mengarahkan kaum muda dalam aksi terorisme.

Kritik kaum muda terhadap pemerintah dan situasi sosial politik memiliki kontribusi atas munculnya radikalisme dan terorisme. Putra Eka, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan berpendapat:

"Terus terang pemuda Muhammadiyah sampai hari ini kalo Medan bilangnye gak percaya terorisme itu ada. Teroris itu adalah muncul akibat ketidakpuasan terhadap kesenjangan yang terjadi di dalam negara ini. Mulai dari masalah ekonomi, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan. Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu yang sering terjadi sehingga acapkali dari ketidakpuasan itu menjadi trauma yang berujung pada sikap radikal."<sup>26</sup>

The Global Youth Wellbeing Index 2017 menyatakan bahwa Indonesia masih jauh dari upaya mendorong partisipasi kaum muda dalam perekonomian. Indonesia menempati peringkat tiga

---

<sup>25</sup> "Api dalam Sekam Keberagaman Gen Z," Survei Nasional tentang Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia pada 2017 oleh PPIM UIN Jakarta.

<sup>26</sup> Putra Eka, Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, 5 September 2017.

terbawah, dan urutan ke-20 dalam aspek kesempatan ekonomi bagi kaum muda. Sementara pada aspek kesejahteraan kaum muda, Indonesia masih berada pada level tengah di urutan ke-10 di kawasan Asia. Indonesia cukup kuat pada “civic engagement” dan pendidikan tetapi sangat lemah pada kesempatan ekonomi, kesetaraan gender dan TIK.<sup>27</sup> Partisipasi kaum muda dalam sosial politik serta inisiatif mereka dalam program pemberdayaan ekonomi memberi harapan besar bagaimana aspek ini menjadi kekuatan besar dalam membendung radikalisme dan terorisme melalui program ekonomi. Fauzi, Brur, Ghazali dan Widodo dengan keterbatasan dana menggerakkan komunitas muda dalam melakukan usaha dan penguatan keterampilan ekonomi lainnya bagi kaum muda Indonesia. Brur bahkan masuk pada aspek lintas komunitas berbeda agama sebagai harapan Poso bebas dari potensi konflik, di samping aktif dalam kampanye anti kekerasan lainnya melalui film pendek yang menysar generasi milenial.

## VI. KAUM MUDA DAN KESEMPATAN EKONOMI

Kaum muda Indonesia memiliki semangat dan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Secara kasar hal itu dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemuda di sektor usaha. Dalam indeks yang diterbitkan oleh UNDP (2017) partisipasi ekonomi dan sosial politik mereka sebagai warga negara jauh melampaui negara-negara lain di Asia. Kaum muda Indonesia menempati urutan ke-2 dalam urutan peringkat *citizen participation*, melampaui India (8), Jepang (12), Filipina (19), China (20), Thailand (26), dan Saudi Arabia (29) (lihat Grafik 1). Ini menjadi modal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pendampingan dan dukungan lebih maksimal terhadap kaum muda dalam dunia usaha dan program ekonomi lainnya. Namun demikian, minimnya pendampingan dan dukungan modal yang diharapkan menopang kegiatan pemberdayaan ekonomi tadi menjadi perhatian masyarakat yang telah mendapatkan bantuan ekonomi dari pemerintah.

---

<sup>27</sup>“The Global Youth Wellbeing Index 2017” diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://www.youthindex.org/country/indonesia>.

Hasan aka Agus Martin (37), mantan napiter asal Lamongan, mendapatkan bantuan ekonomi tetapi tidak mencukupi untuk usaha jangka panjang. Di samping sedikitnya modal yang diberikan, pemerintah juga tidak memberi keterampilan wirausaha yang cukup. Hasan menyatakan “penting bagi napiter untuk mendapatkan pelatihan manajemen pengelolaan bisnis, perkebunan dan pertanian. Tantangan pertanian dan peternakan modern dibutuhkan sebagai bekal *ikhwan*.”<sup>28</sup> Kesempatan melakukan peningkatan keterampilan ekonomi dan usaha secara berkelanjutan diharapkan oleh banyak kaum muda.

Widodo, manajer Dapoer Bistik Solo, melihat kaum muda khususnya mantan napiter membutuhkan pendampingan melalui pendekatan taktis. Kesalahan pendekatan terhadap mereka akan kontraproduktif atas upaya mereka dalam meninggalkan pengalaman kekerasan melalui kegiatan ekonomi.<sup>29</sup>

Pemberdayaan ekonomi kaum muda banyak melibatkan kelompok perempuan. Tetapi, secara makro tingkat kesetaraan gender Indonesia (21) masih jauh di bawah Thailand (12), Filipina (10), Jepang (15) dan China (6). Indonesia lebih baik dari India (27) dan Saudi Arabia (28) (lihat Grafik 1). Perempuan memiliki peran strategis dalam kewirausahaan dan kegiatan ekonomi baik di kalangan mantan napiter maupun masyarakat umum.

The Global Youth Well Being Index 2017 memberi catatan khusus tentang tingginya kaum muda yang menganggur dan sedikitnya kaum muda yang melanjutkan pendidikan dan pelatihan berakibat pada lemahnya mereka dalam persaingan kerja secara nasional dan global. Ditarik kesimpulan dari Indeks Kesejahteraan Kaum Muda 2017:

Economic opportunities for youth are more limited in Indonesia: at US\$3,834, GDP per capita is lower than both the Index (\$15,847) and Rising Income Asia & Oceania regional (\$6,744) averages. High youth unemployment (22 percent) and NEET rates (24 percent of youth not in education, employment, or training), suggest limited job opportunities in the formal labor market and significant barriers to entering

---

<sup>28</sup> Hasan aka Agus Martin, wawancara di Lamongan, 12 Januari 2018.

<sup>29</sup> Widodo, Manajer Dapoer Bistik Solo, presentasi dalam Workshop CISForm-PSTPG-PPIM di Yogyakarta, 29 Januari 2018.

business.<sup>30</sup> (Kesempatan ekonomi bagi kaum muda lebih terbatas di Indonesia: pada rata-rata US\$3.834, GDP per kapita lebih rendah dari Index (\$15.847) dan negara-negara kawasan Asia dan Oceania yang sedang bangkit secara ekonomi (\$6.744). Tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi (22 persen) dan level NEET (24 persen kaum muda tidak dalam masa pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan), menunjukkan kesempatan kerja terbatas dalam pasar kerja formal dan hambatan-hambatan penting dalam memasuki bisnis).

Indonesia berada pada level rendah dalam membuka kesempatan ekonomi, termasuk kebijakan khusus terhadap kaum muda agar lebih terserap ke dalam dunia kerja.

Veryanto Sitohang, Direktur Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Medan menyatakan bahwa ASB menggerakkan kaum muda perempuan dalam kerajinan ulos yang menciptakan kepercayaan diri kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi. Mereka mendapatkan penghasilan tambahan untuk keluarga. Bahkan mereka yang sebelumnya tergantung pada pekerjaan buruh pabrik kini berpindah dalam kegiatan kerajinan yang didampingi ASB. Penghasilan bulanan mereka lebih baik dari pekerjaan mereka sebelumnya melalui komunitas kerajinan ulos ini.<sup>31</sup> Keterbatasan modal dan minimnya pendampingan dari unsur lain, khususnya mereka yang bergerak di dalam usaha *fashion* dan kerajinan tradisional, menyebabkan usaha kerajinan ulos yang dikembangkan komunitas perempuan terhambat oleh pemasaran yang tidak berkembang luas.

Demikian pula, beberapa keluarga mantan teroris yang mendapatkan bantuan modal usaha dari BNPT justru lebih kuat bertahan ketika dilakukan oleh istri-istri mereka. Dalam penelitian PSTPG di Solo, Semarang dan Yogyakarta, ditemukan bahwa beberapa usaha kuliner dan *laundry* yang dikelola oleh istri-istri mantan napiter berjalan lancar dan sukses. Ketekunan dan daya

---

<sup>30</sup>The Global Youth Wellbeing Index 2017, diakses pada 12 Februari 2018 dari <https://www.youthindex.org/country/indonesia>.

<sup>31</sup> Veryanto Sitohang, Direktur ASB Medan, dalam Sambutan Seminar dan Lokakarya di Medan, 24 Januari 2018.

tahan mereka lebih baik dan lebih kuat dibandingkan suami-suami mereka.<sup>32</sup>

## VII. PERAN PEMERINTAH

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu strategi penting yang diharapkan bisa mendorong seseorang tidak melakukan aksi terorisme. Kegiatan usaha menguatkan mereka untuk menolak ajakan bergabung ke dalam organisasi radikal dan mampu menolak melakukan aksi teror. Dukungan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi memberi mereka kepercayaan diri untuk melakukan perubahan dari masa lalu yang penuh aksi kekerasan menjadi seseorang atau kelompok yang produktif dan memberi manfaat untuk masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi dan pelatihan usaha juga sebaiknya diberikan kepada kalangan muda dalam rangka mencegah maraknya peredaran narkoba, sebagaimana terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. Banyak kaum muda tergiur dengan kemudahan mendapatkan uang dari hasil menjadi kurir narkoba. Bahkan tujuh puluh persen penghuni Lapas Nunukan berasal dari kasus kriminal narkoba.<sup>33</sup>

Pada Sidang Umum PBB September 2014, Presiden AS Barack Obama menyatakan bahwa pendekatan kewirausahaan sangat strategis dalam mencegah dan mengatasi radikalisme dan terorisme. Steven R. Koltai dari Brookings Institute mengutip pernyataan Barack Obama soal pentingnya kewirausahaan bagi pondasi perdamaian yang lebih permanen. Koltai menyatakan bahwa "entrepreneurship is a job-creating machine, and jobs provide the growth and economic hope that are the foundation of peaceful, civil societies [Kewirausahaan adalah mesin yang menciptakan pekerjaan, dan pekerjaan-pekerjaan mendorong pertumbuhan dan harapan ekonomi yang merupakan pondasi masyarakat sipil yang damai]."<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Nostalgawan Wahyudi, peneliti PSTPG, catatan penelitian di Solo dan Semarang, 1 September 2017.

<sup>33</sup> Agus Bahrudin, Kepala Lapas Nunukan, Wawancara di Nunukan, 29 Agustus 2017.

<sup>34</sup> Steven R. Koltai, "Fighting ISIS with Entrepreneurship," 7 Oktober 2014. Diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2014/10/07/fighting-isis-with-entrepreneurship/>

Ekonomi memiliki peran krusial dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas masyarakat.

Brur yang memimpin gerakan Komunitas Rumah Katu melalui produksi film pendek menyampaikan pesan perdamaian guna meyakinkan masyarakat internasional bahwa "Poso telah melewati masa konflik dan hubungan harmonis antar komunitas berbeda agama kembali terajut."<sup>35</sup> Brur berharap investasi ekonomi masuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Poso yang lama terpuruk akibat konflik. Koltai melanjutkan: "huge numbers of young people in the Middle East and North Africa do not have jobs—youth unemployment rates can exceed 35 percent—and it is these young men, disillusioned and frustrated, who are drawn to extremism [sejumlah besar kaum muda Timur Tengah dan Afrika Timur tidak memiliki pekerjaan—tingkat rata-rata bisa melebihi 35 persen—dan kaum muda jenis ini, terbawa mimpi dan frustrasi yang tertarik pada ekstremisme]."<sup>36</sup> Potensi kaum yang frustrasi akibat pengangguran dan krisis ekonomi mudah menjadi jalan bagi kelompok ekstremisme dan terorisme untuk melakukan perekrutan anggota dengan cara menjanjikan dukungan ekonomi melalui komunitas yang mereka bangun.

Menurut ajaran yang diyakini kelompok teroris, aktivitas terlarang seperti perampokan dan penindasan bisa dibenarkan sejauh mendukung kepentingan jihad. Misalnya, jauh sebelum Bahrin Naim memperkenalkan *carding* yang memungkinkan orang mendapatkan uang melalui kartu kredit dan upaya pembajakan akun bank secara *online*, Imam Samudra mengarahkan kaum muda untuk belajar mendapatkan uang melalui "perampokan" bank secara *online*. Imam Samudra menyatakan: "sebelum eksekusi Pasal 15 Perpu (ancaman hukuman mati) terlaksana, aku ingin memberikan semacam motivasi kepada remaja atau pemuda Muslim." Imam Samudra menjelaskan empat halaman soal *hacking* dan *carding* yang perlu dipelajari oleh kaum muda. Di samping untuk mendapatkan dana besar, Samudra juga meyakinkan bahwa pekerjaan ini bagian dari Jihad. Samudra melanjutkan:

---

<sup>35</sup> Brur aka Arifuddin Lako, wawancara di Poso, 22 Januari 2018.

<sup>36</sup> Steven R. Koltai, "Fighting ISIS with Entrepreneurship."

“Soal *carding*, jika digunakan untuk pribadi, sebagai Muslim lebih baik tinggalkan saja hal itu. Dan jika untuk kepentingan perjuangan juga ragu, tinggalkan saja. Tetapi jika telah yakin setelah anda mengetahui dalil (dasar hukum) nya, faham, dan meyakinkannya, maka *Go on!* Allah pasti memudahkan urusan Anda selagi ikhlas karena Allah.”<sup>37</sup>

Strategi kelompok teroris untuk menyasar kaum muda sudah umum diketahui. Karena itu pendampingan dan pemberdayaan ekonomi bagi mereka secara jangka panjang dan berkelanjutan akan menjadi pondasi dan pagar kuat bagi mereka untuk terbebas dari upaya rekrutmen yang terus dilakukan oleh kelompok teroris. Hasan pada 2016 ketika selesai masa tahanannya segera setelah kembali ke Lamongan dikontak oleh kelompok teroris untuk diajak beraksi kembali.<sup>38</sup> Komunitas usaha yang dikembangkan oleh YLP telah membuatnya bertahan dari ajakan bergabung kembali ke jaringan dan aksi terorisme.

Bantuan ekonomi diberikan kepada mantan napiter dan mantan kombatan di berbagai daerah. BNPT menjadi lembaga pemerintah paling utama dalam memberi bantuan ekonomi. Dalam wawancara dengan petugas Lapas Solo dinyatakan:

“Kalau BNPT tidak memberikan bantuan uang tapi barang sesuai dengan usaha yang diinginkan. Yang ingin jualan dibelikan gerobak, yang ingin kambing dibelikan kambing, yang ingin jualan *online* dibelikan laptop. Tetapi disayangkan karena kebutuhan banyak barang-barang tersebut dijual lagi.”<sup>39</sup>

Keterampilan kewirausahaan penting diberikan kepada kaum muda dan mantan napiter. Melalui pelatihan manajemen bisnis dan keterampilan ekonomi lainnya, mereka menjadi mandiri dan terhindar dari komunitas teroris. Fasilitator deradikalisasi bidang kewirausahaan BNPT menyatakan:

“Daripada mereka balik lagi ke jaringannya (jaringan teroris) lebih baik kita arahkan ke hal-hal positif untuk mereka. Di samping untuk kemandirian mereka. Sebetulnya kalau untuk

---

<sup>37</sup> Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera, 2004, hal. 256.

<sup>38</sup> Hasan, wawancara di Lamongan, 28 Januari 2018.

<sup>39</sup> Agus Rahmanto, Siswanto dan Mulyono, Wawancara di Bapas Solo, 4 September 2017.

berdagang tidak butuh modal terlalu besar kalau mereka mempunyai *skill* yang bisa mereka buat. Kita juga mendatangkan ahli teknik *marketing* IT, pertemuan pertama memang mereka kebingungan, pertemuan kedua pun sama, pertemuan ketiga mulai memahami cara berjualan melalui media elektronik."<sup>40</sup>

Agus Rahmanto, Siswanto dan Mulyono meyakinkan bahwa ekonomi menjadi faktor penunjang. Ideologi adalah aspek pertama yang perlu ditangani untuk perubahan teroris. Mereka melanjutkan:

"Faktor ekonomi bukan yang signifikan untuk merubah itu, karena pertama ideologi. Ekonomi hanya mendorong saja, bisa lah untuk mengurai usaha kegiatan, minimal mengurangi aktivitas dia di bidang teroris. Kesibukan dia di ekonomi mungkin bisalah mengurangi kesibukan dia yang *dolan* bom bisalah dialihkan untuk *dolan* makanan. Tapi secara ideologis sendiri mereka begitu ada pemicunya ya sudah mereka akan kembali."<sup>41</sup>

Pemerintah memainkan peran paling krusial dalam menggunakan pendekatan ekonomi untuk mengatasi tantangan terorisme dan kriminal transnasional. Pendekatan yang lebih komprehensif dan memenuhi target perlu dibangun dengan cara menjalin kerjasama dengan masyarakat. Karena dalam beberapa aspek pemerintah kurang efektif masuk dalam komunitas kaum muda. Di Solo, beberapa kaum muda terutama mantan napiter tidak menerima kehadiran BNPT dan Polisi dalam pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM akan lebih mudah diterima karena dianggap netral. Mereka memiliki trauma pada masa penangkapan dan penahanan.

Harapan selanjutnya adalah pada masyarakat. Reintegrasi kaum muda mantan pelaku terorisme dan radikalisme di masyarakat jelas memiliki dampak penting. Penerimaan masyarakat terhadap mereka akan memberi rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas ekonomi secara produktif dan berkesinambungan melalui dukungan penuh komunitas.

---

<sup>40</sup> Wawancara di Tangerang, 19 Agustus 2017.

<sup>41</sup> Agus Rahmanto, Siswanto dan Mulyono, Wawancara di Bapas Solo, 4 September 2017.

## VIII. Penguatan Komunitas

Komunitas mantan pelaku terorisme menjadi penggerak masyarakat dalam mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Mereka tidak lagi bergantung pada pemerintah, tetapi secara independen melakukan penguatan jaringan komunitas dalam mengatasi tantangan terorisme. Gerakan mereka mendapat kritik dan tantangan dari individu dan kelompok organisasi dan jaringan mereka di masa lalu, yang masih menyimpan sikap anti pemerintah dan secara sembunyi-sembunyi masih bergerak membangun kekuatan.

Ali Fauzi, misalnya pernah menjadi instruktur pelatihan terorisme di Mindanao di bawah komando Jama'ah Islamiyah. Sebagai instruktur bahan peledak, tentu saja memiliki pengaruh penting bagi ratusan mantan teroris dan mantan kombatan yang tersebar di Indonesia. Pasca bom Bali Oktober 2002 dimana Fauzi juga diduga terlibat, terjadi proses transformasi Fauzi dari komandan dan instruktur terorisme menuju pemimpin penanggulangan dan pencegahan aksi teror, penggerak perdamaian bagi para mantan narapidana terorisme dan mantan kombatan veteran konflik Ambon, Poso dan Mindanao.

Demikian juga Khairul Ghazali yang pernah terlibat dalam perampokan Bank CIMB Niaga dipenjara selama beberapa tahun, kini menjadi penggerak lembaga pendidikan untuk anak-anak mantan teroris Pesantren Al Hidayah di Medan, Sumatra Utara.

M. Haris Iskandar, staf pengajar Pesantren Al Hidayah, menjelaskan Pesantren Al Hidayah menjadi "pusat rehabilitasi dan deradikalisasi dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Yang membuat pesantren ini berbeda dengan pesantren lainnya di Indonesia adalah sebagian besar santrinya anak atau kerabat mantan atau narapidana teroris."<sup>42</sup>

Iskandar diajak bergabung oleh Khairul Ghazali menjadi staf pengajar. Pesantren tersebut didirikan pada 16 Januari 2016, sekitar dua tahun setelah Ghazali memperoleh pembebasan bersyarat pada November 2014. Pendirian lembaga pendidikan ini merupakan

---

<sup>42</sup> M. Haris Iskandar, *Pesantren Al Hidayah Sebagai Pusat Edukasi dan Deradikalisasi di Indonesia*, paper dipresentasikan dalam Seminar dan Lokakarya di Medan, 24 Januari 2018, hal. 1.

bentuk lain dari pemberdayaan ekonomi mantan teroris, yang memberi pengaruh berbeda sebelum dan sesudah mengalami proses rehabilitasi di Lapas.

Iskandar melanjutkan bahwa upaya Ghazali dalam membangun pusat rehabilitasi dan deradikalisasi karena besarnya ancaman bagi Indonesia setelah anak-anak teroris kehilangan orang tua mereka akibat dipenjarakan atau meninggal dalam aksi terorisme. Iskandar menyatakan: "jika anak-anak tersebut pernah mengalami trauma, menyaksikan langsung orang tuanya ditangkap atau ditembak di depan matanya sehingga timbullah dendam dan ujung-ujungnya menjadi teroris. Dan seorang Khairul Ghazali ingin mengakhiri bahaya ini."<sup>43</sup> Banyak di antara anak-anak mantan teroris tidak bisa melanjutkan studi akibat tulang punggung keluarga tidak ada. Iskandar melihat "mereka mendapatkan perlakuan buruk dan stigma negatif dari masyarakat sebagai anak teroris. Inilah salah satu sebab mengapa anak teroris cenderung mengikuti jejak orang tuanya menjadi teroris karena merasa tidak diterima oleh masyarakat."<sup>44</sup>

Komunitas pendidikan yang dibangun oleh Ghazali dan Iskandar berperan penting bagi upaya memutus mata rantai kekerasan dan terorisme. Di samping pendidikan dan pengajaran, Pesantren Al Hidayah juga mengembangkan program-program pertanian dan peternakan.

Komunitas pelaku usaha berbeda yang dibangun di Lamongan memberi kekuatan daya tahan anggota komunitas untuk melawan ajakan dan upaya terus menerus kelompok teroris. Agus Martin alias Hasan lahir pada 17 Agustus 1981, mantan narapidana asal Lamongan ini memiliki pengalaman penting bagaimana program ekonomi dan dukungan komunitas membuat mereka yang baru keluar dari penjara kasus terorisme dapat dengan kuat bertahan dari dorongan luar untuk terlibat kembali dalam gerakan dan aksi terorisme. Hasan merupakan anggota Yayasan Lingkar Perdamaian Lamongan yang hadir menjadi peserta FGD pada 4 September 2017 di kantor YLP di Tenggulun, Solokuro, Lamongan. Dalam forum tersebut Hasan menyatakan: "perkenalkan nama saya Hasan, baru

---

<sup>43</sup> Iskandar, *Pesantren Al Hidayah...*, hal. 1.

<sup>44</sup> Iskandar, *Pesantren Al Hidayah...*, hal. 2.

bebas tahun 2016. Mungkin kendala bagi kami mantan napiter untuk di luar yaitu *soft skill* dan bagaimana bisa hidup setelah keluar dari penjara. Karena banyak kawan-kawan terjebak lagi melakukan lagi karena mereka tidak punya pekerjaan dan tidak punya *skill*... Saya merasakan karena 4 tahun menjalani masa tahanan, kalau tidak ada yang merangkul kami maka ya mereka yang akan merangkul lagi." <sup>45</sup>

Ali Fauzi di hadapan para mantan kombatan dan mantan napiter yang bergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian dalam FGD menyatakan bahwa kaum muda yang terlibat dalam terorisme memiliki alasan ideologis, jaringan komunitas serta manfaat material. YLP menggunakan pola yang sama mengarahkan ideologi dan komunitas ke arah damai, Islam ramah. Dukungan komunitas memberi mereka kekuatan dan kepercayaan diri untuk melakukan transformasi dari pengalaman kekerasan menuju perdamaian. Ali Fauzi menyatakan:

"Karenanya menjadi penting membentuk sebuah komunitas baru yang memberikan *support* yang serupa dengan gaya yang sama, tetapi dengan muatan yang berbeda. Muatannya toleransi, perdamaian, cinta kasih dan bukan Islam yang marah. Keberhasilan membangun komunitas baru perlu dukungan material dan non-material, harus diberikan secara simultan dan tidak bisa dipisah-pisahkan." <sup>46</sup>

Pernyataan Ali Fauzi perlu menjadi perhatian bersama seluruh *stakeholder* baik pemerintah maupun masyarakat untuk bersama mereka membangun komunitas yang kuat, baik dalam pemahaman keagamaan secara terbuka dan damai, maupun dalam mendukung potensi ekonomi yang sedang mereka kembangkan.

## IX. LINTAS SEKTORAL

Kerjasama antar lembaga dan kementerian dalam memprakarsai program-program pemberdayaan menjadi jawaban atas beban dan masalah yang hingga kini belum selesai, khususnya bagi komunitas mantan napiter dan teroris. Reintegrasi mereka di

---

<sup>45</sup> Hasan, mantan napiter, FGD di Solokuro, Lamongan, 4 September 2017

<sup>46</sup> Ali Fauzi, Direktur YLP, FGD di Solokuro, Lamongan, 4 September 2017.

masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol Hamli, menyatakan bahwa sampai dengan akhir 2017 Indonesia telah menahan lebih dari 1400 orang yang terlibat kasus terorisme. Menjadi kebutuhan mendesak kerjasama lintas sektoral pusat dan daerah dalam penanganan radikalisme dan terosime. Pemerintah juga memerhatikan transisi deportan dan returni dari Suriah. Rehabilitasi dilakukan oleh Kementerian Sosial. Setelah dinyatakan cukup, mereka dikembalikan ke daerah masing-masing. Kemensos tidak lagi memiliki wewenang di daerah untuk melanjutkan pendampingan terhadap deportan dan returni. Brigjen Hamli menyatakan bahwa "pemerintah daerah diharapkan turun tangan mendampingi para deportan dan returni. Ini menjadi kendala kurangnya peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam menangani dan mengatasi terorisme."<sup>47</sup>

Program ekonomi bagi kaum muda sebagai pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme membutuhkan kerjasama lintas sektoral baik antar kementerian dan lembaga pemerintah pusat, dan lebih penting lagi keterlibatan dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat di daerah. Dalam wawancara di lima provinsi terhadap dinas, mantan kombatan dan mantan napiter menunjukkan betapa lemahnya pelibatan daerah dalam kegiatan ekonomi dan kebijakan lainnya terkait dengan penanganan terorisme dan radikalisme.

Kasat Bimas Polres Poso, M. Masloeman, menyatakan pentingnya pemerintah daerah dilibatkan dalam pemberdayaan ekonomi kaum muda yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk yang telah ditangani secara langsung oleh BNPT. Koordinasi dengan elemen daerah akan memastikan keberhasilan program ekonomi bagi para kombatan dan mantan napiter. Kasat M. Masloeman menyatakan: "Pasca penegakan hukum dan kembali ke masyarakat, mereka banyak dibantu oleh BNPT tapi tidak ada perkembangan, mungkin hanya sebagian kecil yang berhasil. Setelah pelatihan pendampingan kewirausahaan di Jakarta dan

---

<sup>47</sup> Brigjen Pol Hamli, presentasi dalam Seminar Nasional di Hotel Grand Shahid Jaya Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017.

beberapa mantan napiter, belum ada eksekusi pendampingan yang dilakukan dengan baik. Sebenarnya unsur lokal harus dilibatkan agar program pemberdayaan ekonomi bisa terlaksana dengan baik.”<sup>48</sup>

Poso sebagai daerah yang telah mengalami konflik sosial memiliki karakter penanganan khusus atas mantan kombatan dan mantan teroris dalam konteks resolusi konflik. Program ekonomi bagi kaum muda tidak hanya memiliki tujuan mengatasi radikalisme dan terorisme tetapi sebagai wahana dan instrumen penting bagi terciptanya keamanan dan perdamaian yang lebih permanen. Konflik Poso dijadikan kelompok teroris sebagai ajang rekrutmen dan dukungan masyarakat Muslim atas kelompok yang melakukan aksi terorisme dengan alasan dendam konflik. Mahfud, dinas Pekerjaan Umum Poso, menyatakan bahwa “secara umum memang sebagaimana arahan bupati dan kapolres bahwa mereka (para mantan kombatan) harus diperhatikan demi stabilitas keamanan.”<sup>49</sup> Meskipun keamanan dan perdamaian menjadi aspek penting dalam setiap pengarahannya pimpinan pemerintah daerah, tetapi dinas-dinas tetap memegang prinsip kualitas dan kapasitas. Dalam memberi program kepada mantan kombatan Mahfud, Dinas PU Poso, meyakinkan bahwa “kita juga pihak dinas dan pak Kadis tidak memberikan perlakuan khusus bagi mereka. Ketika kriteria mereka memenuhi untuk item tersebut, ya mereka akan dapat item itu.”<sup>50</sup>

Penanganan kaum muda dan mantan napiter membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Karena keterlibatan mereka dalam kekerasan dan aksi terorisme karena beragam faktor seperti agama, ekonomi dan sosial. Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan menggambarkan:

“Bahwa teroris memanfaatkan situasi karena faktor kekurangan ekonomi. Sarannya adalah memang harus ada tim dari pendekatan ekonomi, agama, dan ideologi. Teroris itu mungkin pendalaman agamanya kurang, ekonominya kurang. Makanya perlu terlibatnya peranan ulama, pengusaha, dan dinas-dinas terkait.”<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Kasat Bimas Polres Poso, wawancara di Poso, 30 Agustus 2017

<sup>49</sup> Mahfud, Dinas Pekerjaan Umum Poso, wawancara di Poso, 1 September 2017.

<sup>50</sup> Mahfud, Dinas PU Poso, wawancara di Poso, 1 September 2017.

<sup>51</sup> Alexander, Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan, wawancara di Medan, 26 Agustus 2017.

Kerjasama lintas sektoral menjadi perhatian pemerintah pada 2018 melalui Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) BNPT yang melibatkan 32 Kementerian dan Lembaga Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme secara nasional. Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi pusat dan daerah, serta antar dinas akan dilakukan lebih kuat. Chomidin atas nama Kepala BNPT, Komjen Pol. Suhardi Alius, menyatakan "BNPT meletakkan empat pilar dalam koordinasi penyusunan RAN-PE, yakni pilar pencegahan, penegakan hukum sekaligus penguatan legislasi, deradikalisasi dan kontra radikalisasi, serta pilar keempat berupa kemitraan dan kerjasama internasional."<sup>52</sup>

## **X. HAMBATAN DAN TANTANGAN**

Pemberdayaan ekonomi dan peningkatan keterampilan ekonomi bagi kaum muda dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme memiliki hambatan dan tantangan. Pertama, masyarakat Muslim belum memiliki satu suara dalam kebijakan mengatasi terorisme. Banyak kelompok masyarakat yang masih melihat upaya pemerintah dalam mengatasi terorisme sebagai kebijakan politik. Di antaranya Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan Putra Eka Zakran, S.H. berpendapat:

"Saya yakin kejadian teroris yang disampaikan di Polda Sumatera Utara baru baru ini, saya memandangnya bukan teroris tetapi adanya pengalihan isu. Pertama, gonjang ganjing tingginya persoalan penistaan agama oleh Ahok, Aksi 212, Aksi 411. Intelejen berupaya memecah konsentrasi umat karena kemarin sudah focus Aksi Bela Islam. Satu cara untuk memecah konsentrasi umat dibuat yaitu dengan cara mengorban diri. Setelah kita melakukan analisa tidak ada kaitannya dengan teroris. Sepertinya korban itu terjebak. Kita tidak bisa memastikan siapa seolah olah dijebak."<sup>53</sup>

Meski Zakran setuju bahwa kesenjangan ekonomi dan pengangguran bisa menjadi penyebab kaum muda melakukan aksi

---

<sup>52</sup> "BNPT-UN Women Gelar Konsultasi Publik RAN-PE Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme," diakses pada 1 Februari 2018 dari <http://teraju.id/berita/nasional/bnpt-un-women-gelar-konsultasi-publik-ran-pe-berbasis-kekerasan-yang-mengarah-ke-terorisme-6803/>.

<sup>53</sup> Putra Eka Zakran, S.H., Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, wawancara di Medan, 5 September 2017.

radikal dan terorisme. Karena bagi Zakran, penanganan keterampilan ekonomi sebagai pendekatan CVE dan kontra terorisme membutuhkan kerjasama multi pihak, dialog dan strategi pendidikan yang lebih efektif bagi kaum muda agar mampu memasuki dunia kerja.

Kedua, ego sektoral yang masih dirasakan di lembaga pemerintah pusat dan daerah. Pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan terorisme bagi kaum muda tidak dipahami sebagai tanggungjawab bersama. Dinas Sosial Kota Medan tidak menganggap bantuan sosial perlu dilakukan terhadap mantan napiter dan kebijakan CVE. Demikian juga Dinas Koperasi dan UKM yang fokus pada pelatihan usaha dan pendampingan koperasi dan tidak pernah menyentuh pada aspek pencegahan dan penanggulangan terorisme. BNPT yang melakukan bantuan ekonomi bagi kaum muda mantan napiter di Poso tidak memberi kepercayaan terhadap institusi kepolisian Poso sebagai mitra lokal. Mereka yakin bantuan ekonomi perlu didampingi dan dimonitor secara lebih dekat agar tepat sasaran dan berkelanjutan.<sup>54</sup>

Arifuddin Lako memandang ego sektoral dalam kebijakan pemerintah dalam pembangunan Poso pasca konflik akan merugikan daerah yang perlu bangkit dan menunjukkan kepada masyarakat luar bahwa Poso kini damai dan siap membangun bersama seluruh lapisan masyarakat yang berbeda agama. Lako memilih mengajak kaum muda Muslim dan Kristen untuk bersama dalam Komunitas Rumah Katu dalam usaha ekonomi kreatif melalui produksi film dan kegiatan bersama lainnya.<sup>55</sup>

Ketiga, payung hukum kurang memadai untuk pembedayaan ekonomi kaum muda dengan melibatkan seluruh *stakeholder*. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) yang diinisiasi BNPT dengan melibatkan 32 kementerian dan lembaga negara diharapkan menjadi payung bersama bagi semua lembaga dari pusat hingga daerah.

Keempat, kesetaraan gender kaum muda Indonesia masih lemah. Perempuan tidak banyak dilibatkan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi dan program kaum muda lainnya. Padahal

---

<sup>54</sup> Wawancara di Poso, 22 Januari 2018.

<sup>55</sup> Arifuddin Lako, wawancara di Poso, 22 Januari 2018.

kaum muda perempuan terbukti lebih kuat dan konsisten dalam melaksanakan dan menjalankan usaha dari modal dan bimbingan yang terbatas. Mantan napiter Solo tidak bertahan bekerja di Dapoer Bistik Solo, tetapi istri-istri mereka tetap melanjutkan usaha sejak awal mereka rintis. Kaum muda perempuan Kota Medan juga semakin kuat membangun komunitas kerajinan Ulos. Mereka tidak didampingi secara memadai dalam perbaikan ketrampilan, modal usaha dan pemasaran.

Kelima, Indonesia tidak bisa melakukan kebijakan pemberdayaan ekonomi kaum muda sendiri. Kerjasama regional akan memperkuat tidak hanya kaum muda Indonesia tetapi masyarakat ekonomi ASEAN. Kerjasama penanggulangan terorisme cukup kuat pada level pemerintah antar negara anggota ASEAN. Mereka memiliki mekanisme yang baik untuk menjaga keamanan regional. Kekurangan ada pada level kerjasama antar lembaga non pemerintah. Organisasi kaum muda Indonesia perlu mulai melakukan aksi bersama dengan organisasi muda negara-negara anggota ASEAN. Pola transnasional teroris seperti JI dan ISIS menyasar kaum muda Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan lainnya.<sup>56</sup> Pertahanan dan kemandirian kaum muda juga perlu melibatkan seluruh negara khususnya yang memiliki perhatian dan kepentingan yang sama.

Pasca peristiwa Marawi, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Singapura semakin menyadari pentingnya kerjasama yang lebih strategis dengan melibatkan banyak negara. Pemerintah Filipina menyadari efektifnya mengadopsi model pendidikan Islam Indonesia yang lebih moderat dan inklusif untuk diterapkan di Filipina Selatan. Organisasi kaum muda dan akademisi Filipina Selatan juga mengunjungi lembaga-lembaga pendidikan dan LSM di Indonesia. Mereka belajar pola diplomasi dan negosiasi resolusi konflik di Poso, Maluku dan Aceh. Mereka juga belajar bagaimana masyarakat mengatasi terorisme. Kegiatan visitasi dan studi banding ini akan memperkuat masyarakat kedua negara secara bilateral maupun masyarakat antar negara secara multilateral.

---

<sup>56</sup> Badrus Sholeh, "Dari JI ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara," *Jurnal Hubungan Internasional*, Oktober 2016-Maret 2017.

## **XI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Kaum muda Indonesia diharapkan memiliki peran aktif dalam partisipasi kewarganegaraan. Mereka mengambil prakarsa membentuk organisasi dan penguatan komunitas yang menggerakkan ekonomi komunitas sebayanya. Yang harus menjadi perhatian adalah, mereka memiliki keterbatasan dana dan fasilitas untuk meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan keahlian ekonomi lainnya.

Program penguatan keterampilan ekonomi kaum muda penting tidak hanya dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme, tetapi juga untuk mengatasi masalah sosial, keamanan perbatasan, dan kriminalitas. Secara internasional posisi kaum muda Indonesia menempati level menengah dalam berbagai aspek. Tantangan besar terdapat pada aspek kesempatan ekonomi dimana Indonesia menempati peringkat terbawah dalam *The Global Youth Wellbeing Index 2017*. Termasuk pula pada bidang kesetaraan gender bagi kaum muda.

Pemerintah dan masyarakat telah mendorong kegiatan pemberdayaan ekonomi sebagai strategi mengatasi terorisme. Pemerintah juga menggunakan pendekatan mengatasi problem perdagangan narkoba dan *human trafficking* atau perdagangan manusia di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara. Kendala pemasaran dan pendampingan usaha menjadi salah satu alasan mengapa beberapa bisnis yang diinisiasi oleh kaum muda mengalami kemunduran. Bahkan beberapa usaha ditutup karena tidak memenuhi profit. Beberapa yang bertahan selalu melakukan inovasi usaha dengan melihat kesempatan dan kekuatan pemasaran *online*. Dinas Koperasi dan UKM Solo mengakui pergeseran usaha yang dilakukan kaum muda tidak lagi pada usaha *offline*, tetapi lebih dominan kewirausahaan *online*. Karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Solo menggandeng beberapa perusahaan pemasaran *online* seperti Bukalapak untuk memberi motivasi kepada kaum muda di Solo dalam melakukan usaha secara lebih berkesinambungan.

Kepemimpinan mantan teroris dalam mendorong proses-proses pendidikan dan pemberdayaan sangat membutuhkan dukungan kebijakan yang koheren dari pemerintah pusat,

pemerintah daerah, masyarakat dan dunia industry. Para mantan teroris ini telah mengembangkan pusat pendidikan dan pengembangan komunitas bagi para mantan teroris dan kombatan. Termasuk anak-anak yang berpotensi terpapar radikalisme dan terorisme.

Report ini direkomendasikan khususnya kepada BNPT, Densus 88, Menteri Sosial, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta pemerintah daerah untuk membangun kerjasama lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung kaum muda dan mantan teroris dan kombatan melalui program pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, pada tingkat ASEAN khususnya di perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina penting melakukan pencegahan perdagangan manusia dan senjata, dan kebijakan integratif pada level regional dalam program pemberdayaan ekonomi kaum muda sebagai upaya pencegahan terorisme dan ekstremisme, serta ancaman keamanan di wilayah Asia Tenggara.

Memberi perhatian kaum muda untuk tidak terjebak dalam jaringan kelompok terorisme dan radikalisme tampaknya perlu menjadi prioritas negara-negara di Asia Tenggara dalam membangun komunitas ASEAN yang kuat. Kesadaran perlu dibangun tidak hanya pada level antar kementerian negara-negara anggota ASEAN tetapi juga organisasi kemasyarakatan, akademia dan organisasi kaum muda pada level regional. Kerjasama antar lembaga non pemerintah khususnya melibatkan kaum muda negara-negara anggota ASEAN perlu dilakukan lebih sistematis dengan dukungan penuh pemerintah. Upaya ini akan membangun komunitas ekonomi ASEAN sejajar dengan organisasi kerjasama regional di Eropa, Amerika dan wilayah lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara, "Pelaku Bom Bali 2005 Diganjar 15 Tahun Penjara," 14 September 2006. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/42263/pelaku-bom-bali-2005-diganjar-15-tahun-penjara> pada 28 Februari 2018.
- "Api Dalam Sekam: Keberagaman Gen Z," Survei Nasional tentang Sikap Keberagaman di Sekolah dan Universitas di Indonesia. Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- "BNPT-UN Women Gelar Konsultasi Publik RAN-PE Berbasis Kekerasan yang Mengarah ke Terorisme," diakses pada 1 Februari 2018 dari <http://teraju.id/berita/nasional/bnpt-un-women-gelar-konsultasi-publik-ran-pe-berbasis-kekerasan-yang-mengarah-ke-terorisme-6803/>.
- "What do we mean by "youth", diakses pada 13 Februari 2018 dari [www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/](http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/youth/youth-definition/).
- "Youth in Asia Pacific", diakses pada 7 Februari 2018 dari <http://www.unescap.org/resources/youth-asia-pacific>.
- Abdurrahman, Abu Sulaiman Aman Abdurrahman. (2013). *Mutiara Dari Balik Penjara Penyejuk Orang Yang Beriman*, Banten: P.T.A Press.
- Chernov Hwang, Julie (2018). *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*, Ithaca: Cornell University Press, 2018.
- Forum Keadilan, "Empat Catatan Teror Kepada Polisi," 10 Juli 2017 diakses pada 14 Februari 2018 dari <https://forumkeadilan.com/forut/empat-catatan-teror-kepada-polisi/>.
- Hamli, Brigjen Pol. (2017). presentasi dalam Seminar Nasional di Hotel Grand Shahid Jaya Jakarta, Rabu, 20 Desember.
- Horgan, John (2009). *Walking Away from Terrorism Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*, New York: Routledge.
- Iskandar, M. Haris (2018). *Pesantren Al Hidayah sebagai Pusat Edukasi dan Deradikalisasi di Indonesia*, paper dipresentasikan dalam

Seminar dan Lokakarya Aliansi Sumut Bersatu (ASB)-PSTPG-PPIM  
UIN Jakarta di Medan, 24 Januari.

- Kessels, Eelco and Nemr, Christina (2016). "Countering Violent Extremism and Development Assistance Identifying Synergies, Obstacles, and Opportunities," Policy Brief, February, Global Center on Cooperative Security. Accessed on January 04, 2018 from <http://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/01/Feb-2016-CVE-and-Development-policy-brief.pdf>.
- Koltai, Steven R. (2014). "Fighting ISIS with Entrepreneurship," 7 Oktober 2014. Diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2014/10/07/fighting-isis-with-entrepreneurship/>
- Kompas, "Pelaku Bom Bunuh Diri Marriott Remaja 18 Tahun ," 8 Agustus 2009, diakses pada 10 Februari 2018 dari <http://tekno.kompas.com/read/2009/08/08/18180192/pelaku.bom.bunuh.diri.marriott.remaja.18.tahun>.
- Rakyat Merdeka, "Pelaku Bom Bali 2005 Diganjar 15 Tahun Penjara," 14 September 2006, diakses pada 12 Februari 2018 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/pelaku-bom-bali-2005-diganjar-15-tahun-penjara-7ctu2gc.html>.
- Samudra, Imam (2004). *Aku Melawan Teroris*, Solo: Jazera.
- Sholeh, Badrus (2017). "Dari Ji ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Gerakan Terorisme di Asia Tenggara," *Jurnal Hubungan Internasional*, Oktober 2016-Maret 2017.
- Stokes, Bruce. (2017). "Global Publics More Unbeat about the Economy," 5 Juni. Diakses pada 13 Februari 2018 dari <http://www.pewglobal.org/2017/06/05/2-public-divided-on-prospects-for-the-next-generation/>
- The Global Youth Wellbeing Index 2017. Diakses pada 13 Februari 2018 dari <https://www.youthindex.org/country/indonesia>.

## **Profil Penulis**

### **Badrus Sholeh, Ph.D**

Direktur Eksekutif Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lahir di Lamongan, 11 Februari 1971. Pada 2015-2017 menjadi Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Kontributor buku: *Handbook of Terrorism and Insurgency in Southeast Asia*, (UK: Edward Elgar Publisher 2007), *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2007), "Dari Ji ke ISIS: Pemikiran Strategis dan Taktis Terorisme di Asia Tenggara" *Jurnal Hubungan Internasional UMY* (2017), *Ekonomi Kaum Muda dan Kebijakan Kontraterorisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018). Riset dan advokasi: Kontraterorisme, Counter Violent Extremism (CVE) dan Hubungan Internasional di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Artikel, opini dan komentar di muat di the Jakarta Post, the Australian, the Straits Times, Kompas, Detik, Forum Keadilan, Media Indonesia, Republika, Rakyat Merdeka, Channel Newsasia, TVRI. Email: [badrus.sholeh@uinjkt.ac.id](mailto:badrus.sholeh@uinjkt.ac.id)

## Profil Lembaga



The Centre for the Middle East and Global Peace Studies (Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global/PSTPG) was established in November 2015. An autonomous institution within Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. It was launched by Dean Prof. Zulkifli on March 3, 2016 during the seminar series on The Map of Terrorist Networks in Southeast Asia after Jakarta Attack with guest speakers Irjen Pol H.M. Tito Karnavian, Ph.D, chief of Jakarta Metropolitan Police, and Professor Rohan Gunaratna, head of International Center for Political Violence and Terrorism Research. The Centre mission is to be a leading research, training and community development on the issues of the Middle East geopolitics, International Conflict, Counterterrorism and Peacebuilding in Southeast Asia and the World. Strengthen regional and global engagements on relevant studies. Publish strategic analysis on political violence, conflict, terrorism and deradicalisation. The Centre will focus on three main topics: The Middle East: Geo-politics and Geo-strategy, Global Peace, Security and Strategic Studies, Counterterrorism and Counterradicalism.



Enhancing the Role of Religious Education in  
Countering Violent Extremism in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta, Jalan Kertamukti No. 5, Ciputat Timur, Tangerang Selatan,  
Banten 15419 Indonesia

Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com)

Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program of:



PUSAT STUDI TIMUR TENGAH  
DAN PERDAMAIAN GLOBAL  
FISIP UIN JAKARTA



Empowered lives.  
Resilient nations.